
ANALISIS KELEMBAGAAN KABUPATEN TANAH BUMBU

Raihanah

raihanahraihanah2503@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Banjarmasin

ABSTRAK

Analisis kelembagaan adalah pendekatan analitis yang memfokuskan pada pemahaman struktur, fungsi, dan interaksi institusi dalam suatu sistem. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi kendala, peluang, dan dinamika hubungan institusi untuk meningkatkan kinerja, adaptabilitas, dan relevansi kelembagaan. Melalui evaluasi mendalam terhadap norma, nilai, dan kebijakan, analisis kelembagaan memberikan landasan bagi perbaikan serta perancangan kebijakan yang lebih responsif terhadap perubahan lingkungan. Sebagai alat diagnostik, analisis kelembagaan memainkan peran krusial dalam mendukung inovasi dan perubahan yang sesuai dengan tuntutan zaman, memastikan kelangsungan dan efektivitas institusi.

Kata kunci: Analisis kelembagaan, Struktur organisasi, Fungsi kelembagaan, Dinamika antarkelembagaan, Peningkatan kinerja, Adaptabilitas, Relevansi kelembagaan, Norma dan nilai, Kelembagaan berkelanjutan, Tata kelola efektif.

ABSTRACT

Institutional analysis is an analytical approach that focuses on understanding the structure, functions, and interactions of institutions within a system. Its main objective is to identify constraints, opportunities, and the dynamics of institutional relationships to enhance performance, adaptability, and relevance. Through in-depth evaluation of norms, values, and policies, institutional analysis provides a foundation for improvements and the design of policies that are more responsive to environmental changes. As a diagnostic tool, institutional analysis plays a crucial role in supporting innovation and changes that align with the demands of the times, ensuring the sustainability and effectiveness of institutions.

Keywords: *Institutional analysis, Organizational structure, Institutional functions, Interinstitutional dynamics, Performance improvement, Adaptability, Institutional relevance, Norms and values, Sustainable institutions, Effective governance.*

PENDAHULUAN

Analisis kelembagaan, sebagai suatu pendekatan analitis, menjadi landasan kritis dalam memahami struktur, fungsi, dan interaksi institusi dalam suatu sistem. Keberhasilan atau kegagalan suatu lembaga dalam mencapai tujuannya tidak hanya ditentukan oleh elemen-elemen internal seperti struktur organisasi dan kebijakan, tetapi juga oleh kemampuannya untuk beradaptasi dengan dinamika perubahan eksternal. Oleh karena itu, analisis kelembagaan menjadi penting untuk membuka tabir kompleksitas institusi, merinci dinamika internal dan eksternal yang memengaruhinya, serta mengidentifikasi potensi perbaikan.

Sejalan dengan perkembangan teori kelembagaan, analisis kelembagaan melibatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana norma, nilai, dan struktur organisasi saling berinteraksi, membentuk budaya organisasi, dan pada akhirnya, memengaruhi kinerja lembaga. Dalam konteks ini, analisis kelembagaan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga bersifat preskriptif, memandang institusi sebagai entitas hidup yang harus dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan untuk tetap relevan dan efektif. (Scott, 2008)

METODE PENELITIAN

Teknik pengolahan data pada analisis kelembagaan menggunakan metode analisis kualitatif dari data sekunder yang di bersumberkan website resmi Jaringan Dokumentasi

dan Informasi Hukum (JDIH) dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIHN). Kemudian ditelaah tugas dan fungsi dari setiap dinas yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelembagaan berfungsi untuk memahami tugas dan fungsi dari setiap bidang dari suatu dinas dan mampu mempermudah pemberian tugas ke setiap bidang dari dinas-dinas yang dimiliki Kabupaten Tanah Bumbu. Jika ditelaah tugas dan fungsi dari setiap dinas yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu.

Proses penyelenggaraan penataan ruang pada Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu perlu melibatkan lembaga atau instansi yang mampu mengkoordinasikan kegiatan penataan ruang mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan sampai dengan pengendalian pemanfaatan ruang. Kelembagaan dalam penyelenggaraan penataan ruang dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yakni lembaga formal pemerintahan dan lembaga non formal dengan melibatkan peran serta atau partisipasi masyarakat.

1. Lembaga Formal

Sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah tingkat kabupaten, lembaga formal pemerintahan yang bertanggung jawab pada aspek penataan ruang adalah Dinas PUPR dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tanah Bumbu. yang merupakan lembaga formal yang menyusun dan menangani Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kabupaten Tanah Bumbu. Selain itu, Dinas PUPR juga yang turut memegang peranan penting dalam upaya pengembangan dan penataan ruang wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dalam kaitannya dengan pengembangan dan pembangunan infrastruktur wilayah.

Pada tingkat Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu kelembagaan formal yang dapat terlibat meliputi pemerintahan desa yang terdiri dari perangkat desa, Lembaga Kemasyarakatan (LKMD), dan Badan Permusyawaratan Desa.

2. Lembaga Non Formal

Lembaga non formal merupakan suatu organisasi yang tidak diresmikan dan muncul karena inisiatif atau budaya masyarakat. Terdapat beberapa lembaga non formal yang akan terkait dengan upaya pengembangan dan penataan ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu ini.

Analisis kelembagaan pada dasarnya disusun untuk mengetahui struktur organisasi pemerintahan di Kabupaten Tanah Bumbu. Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari 6 badan dan 18 dinas.

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari 6 badan, sebagai berikut:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3. Badan Pendapatan Daerah
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari 18 Dinas, sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
5. Dinas Sosial
6. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
8. Dinas Perikanan
9. Dinas Lingkungan Hidup
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
11. Dinas Perhubungan
12. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian
13. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
14. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga, Dan Pariwisata
16. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
17. Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
18. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian
19. Kecamatan

KESIMPULAN

Analisis kelembagaan dalam konteks penataan ruang Kabupaten Tanah Bumbu menyoroti keterlibatan lembaga formal dan non-formal dalam proses ini. Lembaga formal seperti Dinas PUPR dan Bappeda memiliki peran sentral dalam perencanaan dan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sementara lembaga non-formal, seperti pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan, turut berkontribusi melalui partisipasi masyarakat.

Pentingnya koordinasi antara lembaga formal dan non-formal dalam penyelenggaraan penataan ruang terlihat sebagai suatu kebutuhan mendesak. Adanya peran yang jelas dari Dinas PUPR dan Bappeda sebagai lembaga formal pemerintahan, bersinergi dengan partisipasi aktif dari pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan, menjadi kunci untuk mencapai keberlanjutan dan efektivitas dalam pembangunan dan pengelolaan ruang wilayah.

Melalui sinergi antara kelembagaan formal dan non-formal, diharapkan Kabupaten Tanah Bumbu dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan, menjaga keseimbangan antara pengembangan wilayah dan pemanfaatan ruang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Kabupaten Tanah Bumbu, Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021, “Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah”,
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/186578/perbup-kab-tanah-bumbu-no-9-tahun-2021>
Scott, W. R. (2008). *Institutions and Organizations: Ideas, Interests, and Identities*. SAGE Publications.